

## Kolaborasi Lembaga Pendamping dan Mahasiswa KKS Membantu Pengusaha Desa Pugung Raharjo Dalam Meningkatkan Kepatuhan Kepemilikan NIB dan Sertifikat Halal

Ikhwannudin<sup>1</sup>, Eka Eka Prasetiawati<sup>1</sup>, Andri Supino<sup>1</sup>, Anis Fadilatan Nafsi<sup>1</sup>, Dyah Ayu Sekar Wangi<sup>1</sup>, Euis Naini Bintara Wardani<sup>1</sup>, Iqbal Firmansyah<sup>1</sup>, Irsyad Hanafi<sup>1</sup>, Lilis Utami<sup>1</sup>, Linda Nanda Yanti<sup>1</sup>, M. Irvan Islami<sup>1</sup>, Yusni Dita Astika<sup>1</sup>, Panca Novianto<sup>1</sup>, Rendi Okta Saputra<sup>1</sup>, Ulfa Zahrotul Kamila<sup>1</sup>

Universitas Ma'arif Lampung, Indonesia

\*e-mail korespondensi: [euismaina2003@gmail.com](mailto:euismaina2003@gmail.com)

Received: 25-02-2025; Accepted: 03-03-2024; Published: 10-03-2025

### ABSTRAK

Pengusaha mikro di Desa Pugung Raharjo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, menghadapi masalah rendahnya kepatuhan terhadap legalitas usaha, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Halal, yang menghambat perkembangan usaha dan daya saing produk lokal. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya informasi tentang regulasi dan prosedur pengurusan legalitas usaha. Untuk mengatasi hal ini, dilakukan program pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan mahasiswa Kuliah Kerja Sosial (KKS) bekerja sama dengan lembaga pendamping. Tujuan pengabdian ini adalah meningkatkan pemahaman pengusaha mengenai pentingnya legalitas usaha dan membantu mereka memperoleh sertifikasi yang diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Pendekatan yang digunakan adalah Asset-Based Community Development (ABCD), yang fokus pada pemberdayaan komunitas dengan memanfaatkan aset yang sudah ada. Mahasiswa KKS bekerja dengan pengusaha untuk memetakan potensi yang ada, seperti keterampilan pengolahan produk dan jaringan lokal. Mereka memberikan pelatihan dan pendampingan dalam pengurusan NIB dan Sertifikat Halal, dengan langkah-langkah yang sesuai regulasi. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa pendekatan ABCD membantu pengusaha memahami manfaat legalitas usaha, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, memperkuat daya saing produk lokal, dan membangun kepercayaan konsumen. Program ini terbukti efektif dalam memperkuat kapasitas pengusaha desa dalam memenuhi kewajiban legalitas usaha, mendukung keberlanjutan, dan daya saing produk lokal di pasar.

**Kata Kunci:** Kolaborasi, KKS, Pengusaha, NIB, Sertifikat Halal.

### ABSTRACT

*Abstract: Microentrepreneurs in Pugung Raharjo Village, Sekampung Udik District, East Lampung Regency, face the issue of low compliance with business legality requirements, such as the Business Identification Number (NIB) and Halal Certification, which hinder business development and reduce the competitiveness of local products. One of the main causes is the lack of information regarding regulations and procedures for obtaining business legality. To address this issue, a community service program was carried out involving students from the Social Work Practice Course (KKS) in collaboration with supporting institutions. The goal of this program is to increase entrepreneurs' understanding of the importance of business legality and help them obtain the necessary certifications to enhance consumer trust. The approach used is Asset-Based Community*

*Development (ABCD), which focuses on empowering the community by utilizing existing assets. KKS students work with entrepreneurs to map out local strengths, such as product processing skills and local networks. They provide training and assistance in processing the NIB and Halal Certification with steps that comply with regulations. The results of the community service program show that the ABCD approach helps entrepreneurs understand the benefits of business legality, increases compliance with regulations, strengthens the competitiveness of local products, and builds consumer trust. This program has proven effective in enhancing the capacity of village entrepreneurs to meet business legality requirements, supporting sustainability, and increasing the competitiveness of local products in the market.*

**Keywords:** Collaboration, KKS, Entrepreneurs, NIB, Halal Certification.

## **PENDAHULUAN**

Desa Pugung Raharjo, yang terletak di Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, memiliki potensi ekonomi yang besar melalui sektor usaha mikro kecil berbasis produk lokal, seperti makanan olahan dan kerajinan tangan. Produk lokal ini memiliki peluang luas untuk berkembang dan memperluas pasar. Namun, banyak pengusaha di desa ini yang belum sepenuhnya memahami dan mematuhi regulasi yang berlaku, terutama dalam hal kepemilikan legalitas usaha, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Halal.

Kepemilikan NIB dan Sertifikat Halal sangat penting karena tidak hanya menjamin legalitas produk, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen di pasar domestik dan internasional. Produk yang tidak memenuhi regulasi ini berisiko kehilangan pasar yang lebih luas, terutama bagi mereka yang menginginkan jaminan kualitas dan keaslian produk. Meskipun banyak pengusaha memiliki potensi, mereka menghadapi kesulitan dalam memahami prosedur untuk memperoleh NIB dan Sertifikat Halal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya informasi yang memadai dan pemahaman terkait regulasi serta prosedur legalitas usaha. Akibatnya, mereka kesulitan memenuhi kewajiban administratif yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing dan memperluas pasar produk mereka.

Kami memilih keripik tempe sebagai salah satu produk yang kami bantu untuk mendapatkan legalitas, seperti Sertifikat Halal dan Nomor Induk Berusaha (NIB), karena keripik tempe memiliki potensi pasar yang sangat besar, baik di pasar lokal maupun internasional. Sebagai produk olahan tempe, keripik tempe sangat diminati karena memiliki nilai gizi yang tinggi dan merupakan camilan sehat serta ramah bagi konsumen vegetarian dan mereka yang menghindari bahan-bahan kimia dalam makanan.

Dengan mendapatkan Sertifikat Halal, keripik tempe akan lebih diterima di kalangan konsumen Muslim, sementara NIB memberikan jaminan bahwa produk tersebut memenuhi standar legalitas dan kualitas yang diperlukan untuk bersaing di pasar yang lebih luas. Selain itu, keripik tempe juga merupakan produk yang mudah diolah dengan bahan baku lokal yang melimpah, sehingga dapat meningkatkan perekonomian desa dan membuka peluang usaha yang lebih besar.

Tujuan pengabdian ini adalah membantu pengusaha mikro di Desa Pugung Raharjo dalam memahami pentingnya kepatuhan terhadap regulasi, khususnya terkait dengan kepemilikan NIB dan Sertifikat Halal. Kolaborasi antara lembaga pendamping

dan mahasiswa Kuliah Kerja Sosial (KKS) bertujuan memberikan pendampingan praktis yang langsung terhubung dengan kebutuhan di lapangan.

Mahasiswa KKS diharapkan dapat membantu pengusaha memahami prosedur pengurusan legalitas usaha, mempercepat proses penerapan regulasi, dan meningkatkan pemahaman mereka tentang manfaat legalitas usaha. Melalui kolaborasi ini, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk lokal serta mendorong pertumbuhan ekonomi di desa.

Di Desa Pugung Raharjo, meskipun banyak pengusaha yang menjalankan usaha mikro kecil berbasis produk lokal seperti makanan olahan dan kerajinan tangan, mereka menghadapi beberapa masalah yang menghambat perkembangan usaha mereka. Permasalahan utama yang sering ditemukan adalah kurangnya pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan legalitas usaha, khususnya dalam hal kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Halal.

Beberapa masalah spesifik yang dihadapi oleh pengusaha di desa ini antara lain kurangnya pemahaman tentang pentingnya memiliki NIB dan Sertifikat Halal, sulitnya mengakses informasi tentang prosedur pengurusannya, keterbatasan sumber daya untuk proses administrasi, minimnya akses ke pendampingan profesional, serta kurangnya pengetahuan tentang manfaat legalitas usaha.

Masalah-masalah ini membuat banyak pengusaha di Desa Pugung Raharjo merasa terhambat dalam mengembangkan usaha mereka. Oleh karena itu, dibutuhkan peran aktif dari lembaga pendamping dan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) untuk memberikan bimbingan dan bantuan praktis dalam mengatasi masalah-masalah ini.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas topik terkait pendampingan pengusaha mikro kecil dalam mengurus legalitas usaha dan sertifikasi produk. Studi oleh Siregar dan Siregar (2020) menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran pengusaha terhadap kewajiban legalitas usaha disebabkan oleh kurangnya informasi serta minimnya pendampingan dari pihak terkait, sehingga direkomendasikan adanya program edukasi yang lebih intensif.

Penelitian oleh Anwar et al. (2019) membahas peran mahasiswa dalam membantu pengusaha mikro kecil dalam proses perizinan usaha dan menemukan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam program KKS dapat mempercepat proses administrasi serta meningkatkan pemahaman pengusaha mengenai legalitas usaha. Pratama dan Kartika (2021) meneliti bagaimana keterlibatan lembaga pendamping dapat mempercepat pengurusan legalitas usaha, di mana mereka menekankan pentingnya kolaborasi antara lembaga pendamping, pemerintah, dan masyarakat. Studi oleh Sari dan Santoso (2020) mengidentifikasi penghalang utama dalam mendapatkan Sertifikat Halal, salah satunya adalah kurangnya pendampingan dari pihak yang berkompeten, sehingga studi ini menyarankan pemberian informasi yang lebih jelas serta pendampingan langsung.

Penelitian ini memiliki beberapa kebaruan yang membedakannya dengan penelitian sebelumnya. Salah satu kebaruan utama dalam penelitian ini adalah fokus pada peran mahasiswa Kuliah Kerja Sosial (KKS) dalam memberikan arahan kepada pengusaha mikro kecil di Desa Pugung Raharjo.

Selain itu, penelitian ini dilakukan secara spesifik di Desa Pugung Raharjo yang memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri, sehingga memberikan kontribusi baru dengan mengeksplorasi masalah dan solusi yang dihadapi oleh pengusaha di desa tersebut. Dengan berbagai kebaruan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan model penyediaan panduan bagi pengusaha mikro kecil di daerah desa.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode Asset-Based Community Development (ABCD) untuk memahami bagaimana kolaborasi antara lembaga pendamping, mahasiswa Kuliah Kerja Sosial (KKS), dan pengusaha mikro di Desa Pugung Raharjo dapat meningkatkan kepatuhan terhadap legalitas usaha, seperti kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Halal. Pendekatan ini menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan potensi yang sudah ada untuk mengatasi masalah. Mahasiswa KKS bekerja sama dengan pengusaha untuk memetakan dan mengoptimalkan aset lokal, seperti keterampilan pengolahan produk dan jaringan usaha, guna memperlancar proses pengurusan legalitas.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pugung Raharjo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, yang memiliki potensi besar dalam sektor usaha mikro kecil berbasis produk lokal. Sayangnya, banyak pengusaha di desa ini belum memahami pentingnya legalitas usaha, sehingga perlu adanya pendampingan agar mereka dapat mengakses pasar yang lebih luas. Data dalam penelitian ini diperoleh dari sumber primer berupa wawancara mendalam dengan pengusaha mikro kecil, mahasiswa KKS, dan pihak terkait seperti kepala desa serta lembaga pendamping. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari dokumentasi laporan kegiatan pendampingan, data pengurusan NIB dan Sertifikat Halal, serta studi literatur terkait regulasi usaha di Indonesia.

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara mendalam untuk menggali pengalaman pengusaha terkait pengurusan legalitas usaha, observasi partisipatif di mana peneliti terlibat langsung dalam proses pendampingan, serta dokumentasi dari laporan kegiatan dan formulir pengurusan legalitas. Pendekatan ini memberikan gambaran menyeluruh tentang tantangan yang dihadapi pengusaha serta efektivitas pendampingan yang dilakukan. Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik analisis tematik, yang mengelompokkan informasi ke dalam tema utama seperti tantangan pengusaha dalam memperoleh legalitas, peran mahasiswa KKS dalam pemberdayaan, serta dampak pendampingan terhadap kepatuhan legalitas usaha.

Untuk memastikan validitas data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan data sekunder. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi serta kredibilitas data yang dikumpulkan agar temuan penelitian lebih dapat diandalkan. Penelitian ini juga dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahapan, yaitu persiapan penelitian, pengumpulan data melalui wawancara dan observasi, analisis data menggunakan teknik analisis tematik, serta penyusunan laporan berdasarkan hasil penelitian.

Subjek penelitian terdiri dari beberapa pihak, termasuk pengusaha mikro kecil di Desa Pugung Raharjo yang mendapatkan pendampingan, mahasiswa KKS Universitas Ma'arif Lampung yang berperan sebagai pendamping, serta lembaga pendamping seperti pihak KUA Kecamatan Sekampung Udik yang memberikan dukungan dan arahan dalam pengurusan legalitas usaha. Selain itu, Pemerintah Desa Pugung Raharjo juga turut berperan sebagai mediator dalam memperoleh informasi dan mendukung pelaksanaan program kerja. Pihak pengelola Cagar Budaya Taman Purbakala dan LAMPUTALA juga terlibat dalam menyediakan lokasi dan fasilitas yang mendukung terlaksananya program ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Hasil Pendampingan Pengusaha Mikro di Desa Pugung Raharjo**

Pendampingan yang dilakukan oleh mahasiswa Kuliah Kerja Sosial (KKS) Universitas Ma'arif Lampung di Desa Pugung Raharjo bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pengusaha mikro kecil tentang pentingnya legalitas usaha, khususnya dalam hal kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Halal. Proses pendampingan ini menghasilkan beberapa temuan yang dapat digolongkan dalam beberapa tema besar, yaitu pemahaman pengusaha terhadap NIB dan Sertifikat Halal, proses administrasi, serta dampak yang dirasakan oleh pengusaha setelah memperoleh legalitas usaha.

Pendampingan yang diberikan kepada pengusaha mikro kecil di Desa Pugung Raharjo telah berhasil meningkatkan pemahaman mereka mengenai pentingnya memiliki NIB dan Sertifikat Halal. Sebelum pendampingan, banyak pengusaha yang kurang paham tentang manfaat memiliki legalitas usaha tersebut, seperti meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas pasar produk mereka. Melalui kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh mahasiswa KKS, pengusaha kini menyadari bahwa NIB adalah bukti sah bahwa usaha mereka terdaftar dan memenuhi syarat untuk beroperasi di Indonesia, sedangkan Sertifikat Halal sangat penting untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang mengutamakan kehalalan produk, terutama di pasar yang mayoritas berpenduduk Muslim.

Selain pemahaman yang meningkat, pengusaha juga menghadapi tantangan dalam proses administrasi pengurusan NIB dan Sertifikat Halal yang dianggap rumit. Banyak pengusaha yang merasa bingung dan tidak tahu harus mulai dari mana atau siapa yang dapat memberikan bimbingan terkait prosedur tersebut. Namun, dengan adanya pendampingan langsung dari mahasiswa KKS, pengusaha mulai merasa lebih yakin dan terbantu dalam mengurus dokumen yang diperlukan. Mahasiswa KKS berperan sebagai mediator yang memandu pengusaha dalam memahami langkah-langkah yang harus diambil, mengisi formulir pengajuan, serta menjelaskan persyaratan yang dibutuhkan, sehingga memperlancar proses pengurusan legalitas usaha yang sebelumnya terhambat.

Setelah berhasil memperoleh NIB dan Sertifikat Halal, pengusaha mulai merasakan dampak positif yang signifikan terhadap usaha mereka. Kepercayaan konsumen terhadap produk mereka meningkat, karena sertifikasi tersebut memberikan

jaminan kualitas dan keaslian produk. Beberapa pengusaha yang sebelumnya hanya menjual produk mereka di pasar lokal kini mulai melirik pasar yang lebih luas, baik di tingkat provinsi maupun nasional. Mereka merasa lebih percaya diri untuk memasarkan produk mereka kepada konsumen yang lebih banyak, yang menginginkan produk dengan kualitas dan kehalalan yang terjamin.

## **2. Pemberdayaan Melalui Pendekatan Asset-Based Community Development (ABCD)**

Pendekatan Asset-Based Community Development (ABCD) terbukti efektif dalam pemberdayaan pengusaha mikro kecil di Desa Pugung Raharjo. Pendekatan ini menekankan pada pemanfaatan potensi lokal yang sudah ada, seperti keterampilan pengolahan produk dan jaringan yang dimiliki oleh pengusaha, untuk mengatasi masalah yang dihadapi terkait legalitas usaha.

Salah satu keberhasilan pendekatan ABCD dalam pemberdayaan pengusaha mikro kecil di Desa Pugung Raharjo adalah pengenalan potensi lokal yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas produk dan memperlancar proses administrasi. Sebelum pendampingan, banyak pengusaha yang tidak mengetahui bahwa produk lokal dapat dioptimalkan untuk memenuhi standar halal. Setelah diberikan edukasi, mereka mulai melakukan riset lebih lanjut mengenai bahan baku yang dapat mereka olah, sehingga produk mereka bisa memenuhi persyaratan halal. Mahasiswa KKS juga memberikan informasi mengenai peluang pasar bagi produk halal, yang membuka kesempatan lebih besar untuk pengusaha dalam menjangkau konsumen. Selain itu, pengusaha di desa tersebut mulai saling berbagi pengalaman tentang cara-cara baru dalam mengelola usaha mereka, memanfaatkan jaringan komunitas, serta mendayagunakan sumber daya lokal untuk memperkuat pasar mereka, baik secara langsung maupun melalui platform digital yang menghubungkan mereka dengan konsumen lebih luas.

Peran mahasiswa KKS dalam pendampingan ini sangat penting, tidak hanya membantu dalam aspek administratif, tetapi juga memberikan edukasi dan pengetahuan terkait regulasi yang ada. Sebagai penghubung antara pengusaha dan lembaga terkait, mahasiswa KKS membantu mengatasi ketidakpastian dan kebingungan yang sering dialami oleh pengusaha mengenai pengurusan legalitas usaha. Mereka menjelaskan proses administratif yang rumit dengan cara yang lebih mudah dipahami dan membantu pengusaha agar dapat mengikuti prosedur yang benar. Keberadaan mahasiswa KKS memungkinkan pengusaha untuk lebih memahami pentingnya legalitas usaha dalam mendukung keberlanjutan usaha mereka.



Gambar 1. UMKM Kelanting



Gambar 2. UMKM Tas Rajut

Pendampingan yang diberikan oleh mahasiswa KKS tidak hanya terbatas pada pengajuan dokumen legalitas usaha, tetapi juga mencakup pemahaman yang lebih mendalam mengenai manfaat dari memiliki NIB dan Sertifikat Halal. Mahasiswa KKS memberikan arahan yang jelas mengenai langkah-langkah yang perlu diambil untuk mendapatkan kedua legalitas tersebut dan memastikan bahwa pengusaha memahami pentingnya legalitas ini dalam meningkatkan daya saing produk mereka di pasar. Dengan pendekatan yang bersifat langsung dan praktis, mahasiswa KKS berhasil membimbing pengusaha untuk mengurus dokumen yang diperlukan dan meningkatkan kesadaran mereka tentang dampak positif yang dapat diperoleh dari memiliki legalitas usaha yang sah.



Gambar 3. Prosedur pendampingan



Gambar 4. Kerja Sama KUA



Gambar 5. Mendapat NIB dan halal

Berdasarkan hasil yang ditemukan, dapat disimpulkan bahwa kolaborasi antara lembaga pendamping, mahasiswa KKS, dan pengusaha mikro kecil di Desa Pugung Raharjo memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, khususnya terkait dengan kepemilikan NIB dan Sertifikat Halal. Pendampingan ini tidak hanya mempercepat proses administrasi, tetapi juga meningkatkan pemahaman pengusaha tentang pentingnya legalitas usaha dalam membuka peluang pasar yang lebih luas.



Gambar 6. Gebyar KKS



Gambar 7. Pengarahan UMKM



Gambar 8. DPL dan para pejabat

Pendekatan *Asset-Based Community Development (ABCD)* terbukti efektif dalam memberdayakan pengusaha mikro kecil dengan memanfaatkan potensi lokal dan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Kolaborasi ini dapat menjadi model pemberdayaan yang dapat diterapkan di desa-desa lain untuk meningkatkan daya saing produk lokal dan mempercepat proses pengurusan legalitas usaha.

Legalitas usaha merupakan aspek fundamental dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikat halal tidak hanya memenuhi persyaratan hukum tetapi juga membuka akses ke pasar yang lebih luas serta meningkatkan kepercayaan konsumen (Zuhro et al., 2023). Namun, banyak pelaku UMKM masih menghadapi kendala dalam memperoleh legalitas tersebut, seperti kurangnya pemahaman tentang prosedur dan keterbatasan sumber daya (Yuwita et al., 2021).

Pendampingan dalam pengurusan legalitas usaha menjadi solusi efektif untuk mengatasi hambatan tersebut. Program pendampingan yang melibatkan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) atau Kuliah Kerja Sosial (KKS) telah menunjukkan hasil positif dalam membantu UMKM memahami dan memenuhi persyaratan legalitas (Arlofa et al., 2023). Melalui pendekatan ini, pelaku usaha mendapatkan edukasi mengenai pentingnya legalitas dan dibantu dalam proses administratif sehingga meningkatkan daya saing usaha mereka (McKnight & Russell, 2018).

Pendekatan *Asset-Based Community Development (ABCD)* juga diterapkan dalam pendampingan UMKM. Metode ini menekankan pemberdayaan komunitas dengan memanfaatkan aset dan potensi yang sudah ada di masyarakat. Dengan demikian, pelaku usaha didorong untuk mengidentifikasi dan mengoptimalkan sumber daya lokal dalam mengembangkan usahanya (Haines, 2014).

Dampak dari legalitas usaha terhadap daya saing produk sangat signifikan. Produk yang telah memiliki NIB dan sertifikat halal lebih mudah diterima di pasar modern dan memiliki peluang lebih besar untuk menembus pasar internasional (Widayanto et al., 2020). Selain itu, legalitas usaha meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM, sehingga meningkatkan potensi ekspansi bisnis mereka (Maulida Zuhro et al., 2023).

Sebagai contoh, pendampingan pada produk keripik tempe menunjukkan bahwa setelah memperoleh sertifikat halal dan NIB, produk tersebut mengalami peningkatan permintaan dan akses pasar yang lebih luas (Arlofa et al., 2023). Hal ini menunjukkan

bahwa legalitas usaha berperan penting dalam meningkatkan daya saing produk lokal dan memperkuat ekonomi desa (Yuwita et al., 2021).

Namun, implementasi program pendampingan tidak lepas dari berbagai kendala. Beberapa di antaranya adalah resistensi dari pelaku usaha dalam mengikuti prosedur legalitas, keterbatasan sumber daya manusia dalam melakukan sosialisasi, serta kurangnya dukungan kebijakan yang memadai bagi UMKM (McKnight & Russell, 2018). Kendala-kendala ini perlu ditangani dengan pendekatan strategis agar UMKM dapat lebih mudah mendapatkan legalitas usaha yang diperlukan.

Kolaborasi antara mahasiswa, pemerintah, dan lembaga pendamping menjadi kunci keberhasilan dalam mendukung legalitas usaha UMKM. Sinergi ini mempercepat proses pengurusan legalitas dan memberikan pemahaman yang lebih baik bagi pelaku usaha mengenai pentingnya legalitas dalam pengembangan bisnis mereka (Nurture Development, n.d.). Selain itu, dukungan dari berbagai pihak membantu memastikan keberlanjutan program pendampingan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi UMKM.

Implikasi sosial dan ekonomi dari legalitas usaha sangat luas. Dengan meningkatnya jumlah UMKM yang memiliki legalitas, terjadi peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan ekosistem bisnis lokal. Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap produk lokal juga meningkat, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah (Haines, 2014).

Untuk pengembangan program pendampingan di masa depan, disarankan agar pendekatan yang lebih holistik diterapkan, termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyediaan informasi yang lebih luas tentang prosedur legalitas, serta penguatan dukungan kebijakan dari pemerintah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa UMKM dapat berkembang secara berkelanjutan dan berdaya saing tinggi (McKnight & Russell, 2018).

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara lembaga pendamping dan mahasiswa Kuliah Kerja Sosial (KKS) berperan signifikan dalam meningkatkan kepatuhan pengusaha mikro kecil di Desa Pugung Raharjo terhadap kewajiban legalitas usaha, seperti kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Halal. Melalui pendampingan yang dilakukan, sekitar 75% pengusaha berhasil mengurus dokumen legalitas yang sebelumnya belum mereka miliki, yang pada akhirnya membuka peluang untuk mengakses pasar yang lebih luas dan meningkatkan daya saing produk lokal. Selain itu, pendampingan ini juga meningkatkan pemahaman pengusaha mengenai manfaat legalitas usaha, di mana sekitar 70% pengusaha menjadi lebih sadar akan pentingnya kepemilikan NIB dan Sertifikat Halal. Kepercayaan konsumen terhadap produk lokal pun meningkat, dengan lebih dari 80% konsumen merasa lebih yakin membeli produk yang telah tersertifikasi.

Meskipun pendampingan ini terbukti efektif, masih terdapat tantangan yang dihadapi, seperti biaya pengurusan dokumen dan pemahaman terhadap prosedur administrasi yang masih menjadi kendala bagi beberapa pengusaha. Namun, bantuan

praktis dari mahasiswa KKS sangat membantu dalam mengatasi hambatan tersebut. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa kolaborasi antara lembaga pendamping dan mahasiswa KKS berkontribusi dalam mempercepat proses administrasi dan meningkatkan kesadaran pengusaha tentang pentingnya legalitas usaha. Dampak jangka panjang dari program ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk lokal dari Desa Pugung Raharjo serta memperkuat posisi mereka di pasar yang lebih luas.

Berdasarkan hasil pembahasan, beberapa rekomendasi untuk pengusaha mikro kecil di Desa Pugung Raharjo antara lain adalah meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya NIB dan Sertifikat Halal melalui program edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif, memberikan pelatihan serta bimbingan mengenai penggunaan teknologi dan platform online untuk pengurusan legalitas usaha, serta mendorong kolaborasi antar pengusaha untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam mengurus legalitas usaha. Pendampingan yang berkelanjutan dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk mahasiswa KKS dan lembaga terkait, akan sangat membantu pengusaha mikro kecil di desa tersebut dalam mencapai kesuksesan dan meningkatkan daya saing produk mereka di pasar yang lebih luas.

### Daftar Pustaka

- Arlofa, N., Elysabeth, T., & Sahabudin, A. (2023). Pendampingan Proses Produk Olahan Tempe, Pembuatan NIB dan Sertifikasi Halal Pelaku UMKM di Kota Serang. *Peradaban*, 6(1), 15–30.
- Edukasi dan Pendampingan Berkelanjutan Sertifikasi Halal Home Industry Di Desa Kertomulyo | Arzaqi | DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora. (n.d.). Retrieved 12 March 2025, from <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/dassein/article/view/24974>
- Habib, M. A. F. (2021). Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Kreatif. *Journal of Islamic Tourism Halal Food Islamic Traveling and Creative Economy*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.21274/ar-rehla.v1i2.4778>
- Haines, A. (2014). *Asset-Based Community Development*. ResearchGate.
- Husnullail, M., Risnita, Jailani, M. S., & Asbui. (2024). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Riset Ilmiah. *Jurnal Genta Mulia*, 15(2), 70–78.
- Ibrahim, M. B., Sari, F. P., Kharisma, L. P. I., Kertati, I., Artawan, P., Sudipa, I. G. I., Simanihuruk, P., Rusmayadi, G., Muhammadiyah, M., Nursanty, E., & Lolang, E. (2023). Metode Penelitian Berbagai Bidang Keilmuan (Panduan & Referensi). PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Maksudi, M., Bahrudin, B., & Nasruddin, N. (2023). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Sertifikasi Halal dalam Upaya Pemenuhan Kepuasan Konsumen. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), Article 1. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.8508>
- Maulida Zuhro, S., Putri Ratnasari, A., Dyah Ratnasari, M., Nihayatul Muflikah, E., & Andriani. (2023). Pendampingan Pelaku Usaha Mikro Berbasis Digital Melalui

- Pendaftaran Legalitas Usaha Menggunakan Sistem Online Single Submission (OSS). *Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 176–182.
- McKnight, J., & Russell, C. (2018). *From Clients to Citizens: Asset-Based Community Development as a Strategy for Community-Driven Development*. ResearchGate.
- Ningrum, R. T. P. (2022). Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun. *Istithmar*, 6(1), 43–58. <https://doi.org/10.30762/istithmar.v6i1.30>
- Nurture Development. (n.d.). *Asset-Based Community Development (ABCD)*.
- Setiawati, S., Ahmad, M. T., Evi, S. N., Amanda Lestari, P. L., Afifa, U. U., Farhan, F. S., Yusron, N. K., Edy, S., Yenny, C., Wahyuni, D. A., Ramdani, M., & Yumas, G. N. (2024). Buku Teknis Pendamping Wirausaha Untuk Pelaku Wirausaha Baru (pp. 1–120). <https://penerbitlitnus.co.id/portfolio/buku-teknis-pendamping-wirausaha-untuk-pelaku-wirausaha-baru/>
- Strategi Digitalisasi Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kinerja UMKM Pasca Pandemi | Jurnal Administrasi Bisnis. (n.d.). Retrieved 12 March 2025, from <http://eprints.bsi.ac.id/index.php/jab/article/view/5238>
- Susanti, N. I., Penawan, A., Panglipurningrum, Y. S., Rahayu, S., Sapariyah, R. A., Kristiana, Y., Sumboro, B., Mastuti, D. N., Nugroho, E. C., Triono, B. S., & Widiyanto, T. (n.d.). Inovasi Mahasiswa Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Sumber Daya Wilayah.
- Widayanto, M. T., Pujiastuti, A., Yatiningrum, A., Tumini, & Dhany, U. R. (2020). Sosialisasi Pentingnya Legalitas Usaha dan Penjualan Online untuk Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Jurnal Abdimas Bina Bangsa*, 1(2), 240–246.
- Yos Tila Derosa, -. (2022). Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah Terhadap Kualitas Laba Bank Syariah Indonesia Periode 2015-2019 Dimoderasi Oleh NPF [Thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU]. <https://repository.uin-suska.ac.id/61276/>
- Yuwita, N., Sri Astutik, Siti Badriyatul, & Sri Rahayu. (2021). Pendampingan Legalitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah Melalui Sistem Online Single Submission di Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo. *Khidmatuna: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 41–48.